

Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi

**Hanny
Kezia Kurniawati
Benny Shan F. Waruwu
Rangga Pribadi**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi-Univ. Kristen Maranatha
(Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung)
sevenhanny@gmail.com

Abstract

A Cooperative is an autonomous association of persons with similar interest for providing and selling products then share the profits based on the contribution of each member (Hill and Hill 2005). According to Anak Agung Gede Puspayoga, the cooperatives in Indonesia haven't contributed in Indonesian economy significantly, Their contributions was less than 2% to Gross Domestic Product although there were 209,000 units of cooperative in Indonesia (Ahsan and Nurmayanti 2016). The RPJMD 2013-2018 has identified 4 main issues that cooperatives face in Indonesia. The question is whether the same issues were happened in Subang or it only just some general issues in this country without concern about the particular issues in each region of Indonesia. Based on this phenomenon and question, this study presents about the analysis of the strategy and the re-identification of cooperative's main issues in Subang. The sample was using purposive sampling method and obtained a sample of 30 cooperatives in Subang. The analysis data was performed with the descriptive statistics. The result of this study indicates that there are 3 of 4 main issues which identified by RPJMD, have been faced by the cooperatives in Subang and there are several strategies could be applied to solve the issues.

Keywords: Cooperative; Four Main Issues; Re-Identification; Strategy

Pendahuluan

Koperasi adalah sebuah entitas ekonomi yang beranggotakan sekelompok orang dengan kepentingan yang sama untuk menyediakan dan menjual produk serta membagikan keuntungannya berdasarkan kontribusi dari setiap anggotanya (Hill and Hill 2005). Pendirian Koperasi di dunia bermula dari fenomena perekonomian kapitalistis saat itu dimana para penggerak ekonomi yang tidak memiliki dana besar merasa sulit menghadapi para pengusaha besar saat harus bersaing di dunia usaha sehingga kesenjangan ekonomi semakin terasa. Kesenjangan ekonomi tersebut menimbulkan kesadaran bahwa permasalahan kemiskinan yang terjadi saat itu tidak dapat dipecahkan

tanpa adanya kesatuan dan kerjasama di antara para pelaku ekonomi yang bermodal minim (Masngudi 1990). Tak heran bahwa pendirian Koperasi yang memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk bersama-sama mengumpulkan dananya dan menjalankan usahanya melalui badan usaha tersebut, dianggap menjadi sarana untuk mengatasi kelemahan dan kepincangan dari sistem perekonomian yang kapitalistis (Team UGM 1984).

Di Indonesia, Koperasi pertama kali didirikan pada tahun 1896 oleh R. Aria Wiriaatmadja. Keberadaan Koperasi di Indonesia saat itu mengalami pasang surut dan pada akhirnya mereka berhasil menyelenggarakan Kongres Koperasi untuk pertama kali pada tanggal 12 Juli 1947 sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada Kongres Koperasi pertama itulah disepakati pula bahwa azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong (Hadikusuma 2001).

Bertahun-tahun telah bergulir sejak tahun 1947, perkembangan Koperasi di Indonesia dapat dianggap cukup pesat dan senantiasa diarahkan untuk kepentingan rakyat kecil dengan harapan mereka dapat memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Bahkan Koperasi dianggap sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang mendukung negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut Syarifudin Hasan (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia), pada tahun 2009, jumlah Koperasi Indonesia yang tercatat adalah sebesar 170.411 unit dan terus berkembang hingga menjadi 200.808 unit Koperasi pada pertengahan tahun 2013 (Arisanti 2014).

Namun demikian, perkembangan jumlah unit Koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun belum diimbangi dengan pertumbuhan kontribusi Koperasi terhadap perekonomian nasional Indonesia. Hal ini terlihat dari penjelasan Deputy Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian Indonesia, Edy P. Irawady, bahwa dengan jumlah unit Koperasi yang mencapai 200.000 unit dan dengan beranggotakan 35 juta orang ini, kontribusi Koperasi Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia baru mencapai kisaran 2% (Sudoyo 2014). Tentu hal ini menjadi "PR" yang memang menarik untuk ditinjau dan diteliti lebih jauh khususnya dari sudut kendala atau hambatan bagi Koperasi dalam meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Sejauh ini, pelbagai riset dan analisis kritis terhadap isu kendala yang dihadapi oleh Koperasi di Indonesia memang telah banyak dilakukan. Para akademisi dan praktisi berupaya mencari tahu akar permasalahannya demi mencari solusi terbaik bagi Koperasi di Indonesia. Namun hingga saat ini, hasilnya belum mampu mendongkrak kontribusi Koperasi terhadap perekonomian bangsa, bahkan jumlah unit Koperasi yang tidak aktif menjadi sangat signifikan. Berdasarkan rekapitulasi data Koperasi per 31 Desember 2013, jumlah Koperasi yang tidak aktif mencapai 60.584 unit dari 203.701 unit Koperasi yang tercatat saat itu. Kemudian per 31 Desember 2014, jumlah unit Koperasi yang tidak aktif mencapai 62.239 unit dari 209.488 unit Koperasi yang terdaftar (www.depkop.go.id). Jika dihitung berdasarkan data-data tersebut, artinya baik di tahun 2013 maupun di tahun 2014, jumlah unit Koperasi yang tidak aktif mencapai 29,7% dari total unit Koperasi yang terdaftar pada masing-masing tahun tersebut. Seolah-olah peningkatan jumlah unit Koperasi yang tidak aktif sejalan dengan pertumbuhan jumlah unit Koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya bukan suatu kabar yang menggembirakan, terlebih lagi saat ini, kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menimbulkan tantangan lebih bagi Koperasi di Indonesia. Mengingat tantangan yang terus berkembang ini dan mengingat kondisi

perkembangan Koperasi di Indonesia saat ini, maka riset mengenai kendala dan strategi yang berkaitan dengan Koperasi memang perlu dilakukan secara terus-menerus.

Berdasarkan rekapitulasi data Koperasi per 31 Desember 2014 yang disajikan di www.depkop.go.id, Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah unit Koperasi terbanyak adalah Jawa Timur, kemudian disusul dengan provinsi Jawa Tengah sebagai peringkat kedua, dan Jawa Barat sebagai peringkat ketiga. Dilihat dari data unit Koperasi yang tidak aktif pada tahun 2014, jumlah unit Koperasi Jawa Timur yang tidak aktif adalah 3.710 unit dari 30.850 total unit Koperasi di Jawa Timur (12% tidak aktif), kemudian jumlah unit Koperasi Jawa Tengah yang tidak aktif adalah 5.221 unit dari 27.784 unit Koperasi di Jawa Tengah (18,8% tidak aktif). Sedangkan jumlah unit Koperasi Jawa Barat yang tidak aktif mencapai 9.930 unit dari 25.563 unit Koperasi di Jawa Barat (38,8% tidak aktif). Melihat dari persentase unit Koperasi yang tidak aktif di Jawa Barat menjadi yang tertinggi di antara ketiga provinsi tersebut, maka riset mengenai kendala dan strategi dalam tulisan ini lebih difokuskan pada wilayah Jawa Barat.

Berbicara tentang kendala yang dihadapi oleh Koperasi di Jawa Barat, terdapat 4 (empat) permasalahan utama Koperasi yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, yakni sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan organisasinya yang masih rendah.
- b. Kualitas dan kuantitas SDM, akses pasar, akses kelembagaan, akses pembiayaan dan informasi serta penggunaan teknologi tepat guna yang masih minim
- c. Produk Koperasi memiliki daya saing yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk impor.
- d. Tingkat inovasi dan pengembangan produknya masih minim.

Disamping mengenai kendala utama Koperasi di Jawa Barat, dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 juga terdapat 2 (dua) strategi yang diharapkan dapat menjadi solusi atas kendalanya, yakni: (a) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi, yang disertai dengan adanya perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi;

(b) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi.

Tak diragukan lagi bahwa rumusan kendala dan strategi Koperasi yang tersaji dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 merupakan hasil pemikiran yang matang serta didasari oleh data riset yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kendala yang dirumuskan tersebut merupakan kendala Koperasi secara umum di Jawa Barat atau sudah mewakili seluruh kendala pada tiap-tiap kota di Jawa Barat? Adakah kendala khusus/spesifik yang dihadapi Koperasi di setiap kota namun belum masuk ke dalam rumusan kendala dalam RPJMD tersebut? Jika terdapat kendala khusus yang dihadapi Koperasi di setiap kota, maka apakah strategi untuk Koperasi yang telah dirumuskan ini dapat menjadi solusi yang memadai bagi Pemerintah Daerah dalam upayanya untuk mendongkrak eksistensi Koperasi di Jawa Barat? Bagaimanapun juga, keberhasilan Koperasi di Jawa Barat merupakan akumulasi dari keberhasilan Koperasi yang berada di kota-kota wilayah Provinsi Jawa Barat sehingga strategi yang baik tentunya harus dapat pula mengatasi setiap kendala spesifik di setiap kotanya, disamping mampu mengatasi kendala Koperasi Provinsi Jawa Barat secara umum.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka penelitian ini dilakukan pada sebuah kota di Jawa Barat bernama Subang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah masalah yang dihadapi oleh Koperasi di kabupaten Subang memang sudah terwakilkan oleh rumusan 4 masalah utama Koperasi yang tertera dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018?
- b. Apakah terdapat masalah spesifik yang sesungguhnya merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Koperasi di Kabupaten Subang?

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi di kota yang berada dalam wilayah Jawa Barat tersebut memang sesuai seperti yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 sehingga strategi yang telah direncanakan dalam RPJMD tersebut dapat terasa lebih efektif.

Kerangka Teoritis

Koperasi: Pengertian, Prinsip Dasar, dan Jenis-jenisnya

Koperasi berasal dari kata "*cooperative*" yang artinya adalah bekerja bersama. Adapun pengertian Koperasi yaitu suatu organisasi yang terdiri dari kumpulan orang dengan kepentingan ekonomi yang sama dimana orang-orang tersebut berupaya memenuhi kepentingannya melalui kerjasama mereka dalam mengelola dan mengawasi organisasinya sehingga perusahaan/organisasinya dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada orang-orang tersebut (Maelani 2011).

Koperasi memiliki prinsip-prinsip dasar yang wajib diketahui, dijiwai dan ditaati oleh para pemangku kepentingannya. Prinsip dasar Koperasi dituangkan pada pasal 6 di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang PerKoperasian, yang meliputi:

- a. Keanggotaan Koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengawasan oleh anggota yang harus diselenggarakan secara demokratis.
- c. Peran serta Anggota Koperasi secara aktif dalam kegiatan ekonominya.
- d. Pemahaman bahwa Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e. Koperasi wajib mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta terbuka terhadap masyarakat mengenai jati diri dan kegiatannya.
- f. Koperasi wajib memberikan pelayanan secara optimum kepada anggotanya serta berupaya untuk mengembangkan gerakan Koperasi melalui kerjasama dalam pelbagai kegiatan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.
- g. Koperasi wajib bekerja untuk melakukan pembangunan yang berkesinambungan demi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh para anggotanya.

Adapun jenis-jenis Koperasi yang berkembang di Indonesia (Sudarsono dan Edilius 2005) adalah sebagai berikut:

A. Berdasarkan usaha pokoknya, jenis Koperasi dibagi menjadi:

1. Koperasi Kredit,

Adalah Koperasi yang menghimpun dana dari anggotanya dan kemudian memberikan fasilitas peminjaman khusus untuk anggota-anggotanya yang

membutuhkan dana untuk tujuan tertentu. Jenis Koperasi ini muncul pertama kali di Jerman dan kemudian mulai didirikan oleh negara-negara lainnya.

2. Koperasi Konsumsi,
Adalah Koperasi yang didirikan untuk menyediakan produk yang digunakan oleh para anggotanya sehingga Koperasi konsumsi ini berfungsi sebagai bagian pengadaan produk sedangkan anggotanya berfungsi sebagai para pemakai
 3. Koperasi Produksi
Adalah Koperasi yang didirikan untuk menghimpun produk yang dihasilkan oleh para anggotanya. Di sini, Koperasi bisa saja beranggotakan individu yang berperan sebagai karyawan produksi sekaligus pemiliknya atau bisa saja beranggotakan para pengusaha yang berkumpul untuk menyatukan produk usahanya.
 4. Koperasi yang bergerak di bidang pelayanan
Adalah Koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan yang menunjang kebutuhan anggota saat hendak mengembangkan usahanya. Contohnya: Koperasi kesehatan, Koperasi telepon, Koperasi asuransi, dan lain-lain.
- B. Berdasarkan unit usahanya, Koperasi dibedakan menjadi:
1. Koperasi Usaha Tunggal
Adalah Koperasi yang bergerak pada satu usaha tertentu.
 2. Koperasi Usaha Majemuk
Adalah Koperasi yang memiliki aneka ragam fungsi dan komoditi, contohnya: KUD. Koperasi Usaha Majemuk ini sering dikenal dengan nama Koperasi Serba Usaha.
- C. Berdasarkan sektor ekonomi, jenis Koperasi antara lain:
1. Koperasi Kerajinan
 2. Koperasi Peternakan
 3. Koperasi Perikanan
 4. Koperasi Perindustrian
 5. Koperasi Perkebunan, dan lain-lain.
- D. Berdasarkan produknya, jenis-jenis Koperasi meliputi:
1. Koperasi Tebu
 2. Koperasi Tembakau
 3. Koperasi Susu
 4. Koperasi Kelapa
 5. Koperasi Kain dan sebagainya
- E. Berdasarkan daerah operasionalnya, jenis Koperasi di Indonesia meliputi:
1. Koperasi Pasar
 2. Koperasi Unit Desa
 3. Koperasi Serba Usaha Perkotaan
- F. Berdasarkan lingkup tingkatnya, jenis-jenis Koperasi adalah sebagai berikut:
1. Koperasi Primer
Adalah Koperasi yang beranggotakan minimal 20 orang.
 2. Koperasi Pusat
Adalah Koperasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) Koperasi Primer sebagai anggotanya.
 3. Koperasi Gabungan
Adalah Koperasi yang beranggotakan minimal 3 (tiga) unit Koperasi Pusat.
 4. Koperasi Induk

Adalah Koperasi yang anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) unit Koperasi Gabungan.

G. Berdasarkan lingkup fungsionalnya, terdapat jenis Koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi Karyawan
2. Koperasi Pemuda
3. Koperasi ABRI
4. Koperasi Pegawai Negeri, dan lain-lain

Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Bangsa

Salah satu kesepakatan yang dibuat dalam Kongres Koperasi Pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, berbunyi bahwa asas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong (Hadikusuma 2001). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Keselarasan antara asas Koperasi Indonesia dan UUD 1945 ini membuat keberadaan Koperasi di negeri ini dapat membantu Pemerintah dan masyarakat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila. Tak heran jika Koperasi dianggap sebagai pilar utama, tulang punggung atau soko guru perekonomian Indonesia.

Beberapa alasan lainnya yang dikemukakan oleh Sri Edi Swasono dalam Firmansyah (2014) bahwa keberadaan Koperasi merupakan pilar utama perekonomian bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Koperasi dapat menjadi sarana untuk menampung pesan politik yang menyadarkan masyarakat akan kepentingan bersama dan bagaimana menolong diri sendiri secara bersama-sama demi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
2. Koperasi dapat menjadi badan usaha yang mampu memelihara serta memperkuat idealisme dan budaya bangsa Indonesia. Dengan keberadaan Koperasi di negeri ini, maka budaya bangsa untuk selalu bergotongroyong akan berkembang subur.
3. Koperasi dapat menjadi wahana yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil mengingat kelompok ekonomi kecil ini merupakan permasalahan yang bersifat makro. Dengan adanya Koperasi, kelompok ekonomi kecil dapat menghimpun kekuatan dan sumber daya mereka menjadi satu sehingga mereka memiliki kekuatan dan daya saing yang lebih baik di dalam dunia usaha. Saat mereka lebih mudah untuk menghadapi persaingan para pengusaha besar, maka mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian mereka dan menaikkan taraf hidup mereka menjadi kelompok ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian, Koperasi dapat membantu Pemerintah untuk mengatasi permasalahan makro ini dengan mengubah kelompok ekonomi kecil menjadi kelompok ekonomi menengah ke atas.
4. Koperasi merupakan badan usaha yang berwatak sosial serta dapat didirikan dalam berbagai bentuk badan usaha seperti CV, Firma, PT bahkan dalam bentuk BUMN.

Untuk memperkuat keberadaan Koperasi Indonesia selaku Soko Guru Perekonomian Indonesia maka kontribusi Koperasi terhadap perkembangan perekonomian Indonesia perlu mendapat perhatian. Disini, setiap kendala yang menghambat Koperasi dalam memberikan kontribusi perlu diidentifikasi dan strategi yang dapat membantu Koperasi untuk mengatasi permasalahan atau kendala mereka juga perlu dipikirkan.

Empat Masalah Utama Koperasi Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018

Seperti yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa ada empat masalah utama yang dihadapi oleh Koperasi di Jawa Barat berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018. Penjelasan lebih lanjut mengenai masalah utama Koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan organisasinya yang masih rendah.
Umumnya anggota Koperasi merasa cukup dengan usaha sendiri-sendiri. Padahal pelbagai masalah yang dihadapi mereka akan lebih mudah terpecahkan melalui upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama (Harini, 2013). Rendahnya keinginan mereka untuk bersama-sama berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan kegiatan organisasinya tersebut, terjadi karena pemahaman mereka mengenai apa itu Koperasi masih sangat rendah. Mereka tidak menyadari bahwa dengan rendahnya partisipasi mereka di dalam Koperasinya akan menyebabkan tetap kecilnya sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk menjalankan usaha sehingga fungsi Koperasi tidak dapat dirasakan. Rendahnya pemahaman mereka akan Koperasi diduga disebabkan oleh minimnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan terhadap anggota Koperasi. Hal ini disebabkan karena pengurus beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak membawa manfaat untuk pribadi mereka (Irdhania dkk. 2008).
- b. Kualitas dan kuantitas SDM, akses pasar, akses kelembagaan, akses pembiayaan dan informasi serta penggunaan teknologi tepat guna yang masih minim
- c. Tingkat inovasi dan pengembangan produknya masih minim.
- d. Produk Koperasi memiliki daya saing yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk impor.

Berdasarkan data *World Economic Forum* pada tahun 2008, daya saing produk Indonesia masih tergolong rendah. Saat itu, Indonesia menduduki peringkat 55 dari 134 negara. Sebagai gambaran, Singapura menduduki peringkat ke-5, Thailand menduduki peringkat ke-34 dan Malaysia menduduki peringkat ke-21 dari daya saingnya. Kondisi ini akan menyebabkan tingkat produksi Koperasi (yang merupakan salah satu badan usaha di Indonesia) mengalami tekanan dan membuat Koperasi sulit bertumbuh. Kondisi ini diduga disebabkan oleh: (1) Lemahnya keterampilan teknis dan penguasaan teknologi di kalangan SDM, (2) Terbatasnya produk berbasis teknologi tinggi, (3) Produk yang dihasilkan umumnya belum memiliki standar mutu, (4) Akses modal yang terbatas, (5) Akses dan jejaring pemasaran yang masih terbatas dan kurang berkembang (Sitompul, 2010)

Rencana Strategis Jawa Barat berdasarkan RPJMD 2013-2018

Visi Jawa Barat pada tahun 2013-2018 adalah "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua". Sedangkan Misi Jawa Barat yang tertuang di dalam RPJMD 2013-2018 adalah:

- a. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
- b. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
- c. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik.
- d. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.

- e. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Dilihat dari visi dan misi Jawa Barat pada tahun 2013-2018 maka upaya pengembangan Koperasi sejalan dengan misi Jawa Barat untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan (poin b). Secara eksplisit, kebijakan yang dibuat sebagai strategi Pemerintah Jawa Barat pada tahun 2013-2018 di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha (RPJMD 2013-2018)

Metode Penelitian

Kriteria Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi di kabupaten Subang yang masih aktif hingga pengambilan data lapangan selesai dilakukan. Unit observasi penelitian ini adalah para pengurus Koperasi yang memiliki kedudukan struktural dari Koperasinya, sebagai contoh: pimpinan, ketua, bendahara, atau pengawas Koperasi tersebut, sedangkan staf atau karyawan Koperasi tidak dimasukkan ke dalam kategori pengurus Koperasi.

Teknik Pengambilan Sampel

Kabupaten Subang terbagi atas 253 desa dan kelurahan yang tergabung dalam 22 kecamatan. Kabupaten Subang ini memiliki banyak Koperasi.

Dengan demikian pengambilan sampel Koperasi perlu dilakukan. Jumlah unit Koperasi yang dijadikan sampel penelitian ini ditargetkan sebanyak 30 unit dimana setiap unit akan membutuhkan 3 responden. Dengan demikian total responden penelitian ini di kabupaten Subang adalah 90 orang. Adapun teknik yang digunakan dalam proses pengambilan sampel penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya (responden). Data primer tersebut meliputi data hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi fisik, peninjauan dokumen Koperasi yang terpilih. Data primer ini diambil pada tahun 2014.
2. Data sekunder, yaitu data yang telah dipublikasikan. Data ini digunakan untuk mengeksplorasi teori dan atau konsep yang terkait dengan Koperasi dan pelbagai indikator masalah utama Koperasi di Jawa Barat. Untuk memperoleh data ini, peneliti melakukan studi pustaka dan telaah literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, publikasi BPS maupun publikasi lembaga-lembaga lain yang terkait.

Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif sehingga analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif terhadap data kualitatif atau berskala nominal. Sebagai informasi bahwa penelitian ini merupakan studi kasus dan bukan analisis statistika untuk tujuan

generalisasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini hanya akan menggambarkan dan memotret karakteristik objek yang diteliti berdasarkan indikatornya.

Indikator Penelitian

Sebagai indikator penelitian ini, Peneliti menggunakan empat masalah utama Koperasi Indonesia menurut RPJMD Provinsi Jabar 2013-2018. Adapun penjabaran dari 4 indikator penelitian ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha Koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggota dibanding potensi yang ada. • Jumlah dan frekuensi anggota dalam memenuhi kebutuhannya melalui Koperasi. • Jumlah dan frekuensi anggota yang rajin menabung/menyimpan dana di Koperasi. • Persentase anggota yang mengikuti rapat tahunan anggota. • Rata-rata jumlah anggota yang terlibat dalam kegiatan Koperasi di luar rapat tahunan anggota. • Rasio jumlah pinjaman anggota dengan simpanan dan modal Koperasi. • Banyaknya saran perbaikan dari anggota untuk kemajuan kegiatan dan usaha Koperasi. • Ketepatan anggota dalam membayar kembali pinjaman Koperasi.
2. Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan teknologi tepat guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan pengurus dan staf/karyawan yang dimiliki Koperasi. • Pengalaman para pengurus Koperasi. • Pelatihan dan atau lokakarya dalam bidang terkait dari para pengurus dan staf/karyawan Koperasi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian antara pendidikan dan atau pengalaman pengurus dan staf/karyawan dengan bidang pekerjaan/tanggung jawab yang saat ini dipikul. • Kriteria untuk diangkat menjadi pengurus atau staf/karyawan Koperasi. • Terpenuhinya kriteria untuk menjadi pengurus dan atau staf/karyawan Koperasi. • Pasar utama produk Koperasi. • Kemitraan atau kerjasama yang telah dibangun dengan usaha lain dalam pemasaran produk Koperasi. • Kemudahan dan ketersediaan peluang produk Koperasi masuk dalam gerai usaha retail. • Kemampuan Koperasi dalam memenuhi spesifikasi produk, yang diminta mitra usaha. • Pemanfaatan komputer dalam pelaksanaan proses bisnis Koperasi, mencakup: produksi, pembelian, pemasaran, keuangan dan akuntansi dll.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas internet di setiap Koperasi. • Pemanfaatan yang optimum atas fasilitas internet untuk pemerolehan dan penyebarluasan informasi, serta pembentukan jejaring. • Penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi. • Kemudahan dalam akses perbankan guna memperoleh sumber dana untuk pembiayaan dan atau pengembangan usaha Koperasi. • Kemudahan dalam persyaratan dan proses untuk memperoleh kredit bank. • Kemudahan dalam pemerolehan pinjaman lunak dari BUMN. • Kemudahan dan kecepatan dalam pemerolehan informasi, baik dari pemerintah maupun dunia usaha terkait dengan Koperasi. • Pengakuan pemerintah maupun masyarakat terhadap Koperasi sebagai lembaga ekonomi. • Terciptanya hubungan yang sinergis dengan Koperasi lainnya dalam suasana yang kondusif dan saling menguntungkan. • Adanya struktur organisasi dengan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam organisasi Koperasi. • Pemeliharaan hubungan yang baik dan harmonis dengan lembaga dan dinas pemerintah maupun pihak lain untuk menguatkan dukungan atas keberadaan Koperasi. • Adanya akta pendirian Koperasi dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM. • Tata kelola yang baik dalam organisasi Koperasi.
<p>3. Daya saing produk Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis, jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan Koperasi. • Harga pokok dan harga jual setiap jenis produk yang dihasilkan. • Ketepatan perhitungan harga pokok setiap produk. • Harga produk impor di pasar. • Persepsi/dugaan tentang murahnya produk impor. • Skenario kemungkinan penurunan harga pokok dan harga jual produk.
<p>4. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya jenis dan variasi setiap jenis dari produk Koperasi setiap tahun dalam lima tahun terakhir. • Banyaknya jenis dan variasi setiap jenis dari produk Koperasi yang tidak lagi dipasarkan dalam lima tahun terakhir.
<p>Diadopsi dari: RPJMD Provinsi Jabar 2013-2018</p>	

Langkah Kerja Teknis

Adapun langkah-langkah teknis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan sampel
2. Pembentukan tim kerja/kelompok peneliti untuk area sampel kabupaten Subang.
3. Penelitian lapangan dimana tim kerja akan terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. (Target waktu pengumpulan data adalah lima sampai tujuh hari).
4. Analisis dan pengolahan data. Tahap ini dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai untuk setiap area sampel dengan menggunakan metoda analisis bersifat deskriptif kualitatif.
5. Penyusunan laporan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Survei Mengenai Profil Koperasi Kabupaten Subang

Berdasarkan survei yang telah kami lakukan terhadap pengurus Koperasi Kabupaten Subang, kami hanya memperoleh 30 kuesioner dari 90 kuesioner yang diedarkan. Ketiga puluh kuesioner yang telah kami kumpulkan tersebut telah diisi lengkap dan dapat dijadikan data acuan untuk memperoleh informasi deskriptif tentang permasalahan Koperasi di Kabupaten Subang. Dari 30 kuesioner tersebut, dapat diidentifikasi mengenai pengelompokan Koperasi di Subang.

Berdasarkan lingkup tingkat dan luas daerah kerjanya, pengelompokan Koperasi di Subang terdiri dari: 3% merupakan Koperasi pusat, 80% merupakan Koperasi primer dan sejumlah 17 % merupakan Koperasi sekunder. Berdasarkan status keanggotaannya, sejumlah 10% merupakan Koperasi produsen, sejumlah 20% merupakan Koperasi konsumen, serta sejumlah 70 % merupakan Koperasi produsen dan konsumen.

Masing-masing Koperasi memiliki aktiva tetap berupa bangunan, komputer serta peralatan teknologi pendukungnya seperti printer dan fax, serta lemari, meja dan kursi. Selanjutnya sebanyak 40% Koperasi menyatakan memberikan pelatihan kepada pengurus Koperasi, sedangkan sebanyak 60% menyatakan tidak ada pelatihan bagi pengurus Koperasi.

Hasil Penelitian Tentang 4 Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di bagian pendahuluan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengidentifikasi empat masalah yang dihadapi Koperasi Jawa Barat saat ini. Tim peneliti telah melakukan survei sebagai upaya mendeskripsikan permasalahan Koperasi di Kabupaten Subang. Hasilnya survei tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Anggota dalam Pengembangan Kegiatan Usaha Koperasi
Tingkat Partisipasi anggota digambarkan melalui kehadiran rapat, penggunaan jasa Koperasi, rata-rata pertumbuhan Koperasi, minat menjadi pengurus, serta adanya saran dan masukan anggota. Berdasarkan survei yang dilakukan terkait dengan jumlah persentase kehadiran rapat oleh anggota Koperasi, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
 - sebanyak 6,7% Koperasi menyatakan rapat Koperasi dihadiri oleh 6 % anggotanya,

- sejumlah 6,7% Koperasi menyatakan rapat Koperasi dihadiri oleh 75% anggotanya,
- sejumlah 6,6% Koperasi menyatakan rapat Koperasi dihadiri oleh 90% anggotanya,
- sejumlah 20% Koperasi menyatakan rapat Koperasi dihadiri oleh 50% anggotanya,
- sejumlah 10% Koperasi menyatakan rapat Koperasi dihadiri oleh 40% anggotanya,
- sejumlah 20% Koperasi menyatakan rapat Koperasi dihadiri oleh 80% anggotanya,
- sejumlah 30% Koperasi menyatakan rapat Koperasi dihadiri oleh 30% anggotanya.

Selanjutnya untuk persentase penggunaan jasa Koperasi oleh anggotanya, hasil survey menunjukkan bahwa:

- 10% Koperasi menyatakan bahwa 60% anggotanya menggunakan jasa Koperasi,
- 30% Koperasi menyatakan bahwa 50% anggotanya menggunakan jasa Koperasi,
- 10% Koperasi menyatakan bahwa 10% anggotanya menggunakan jasa Koperasi,
- 20% Koperasi menyatakan bahwa 20% anggotanya menggunakan jasa Koperasi,
- 20% Koperasi menyatakan bahwa 96% anggotanya menggunakan jasa Koperasi dan
- 10 % Koperasi menyatakan bahwa 30% anggotanya menggunakan jasa Koperasi.

Adapun rata-rata pertumbuhan Koperasi berkisar antara 10% hingga 25% per tahun. Sedangkan tingkat minat anggota untuk tidak menjadi pengurus Koperasi sebanyak 26,6 %. sedangkan 73,4% Koperasi menyatakan anggotanya memiliki minat dan antusiasme untuk menjadi pengurus. Kemudian mengenai saran dan masukan dari setiap anggota pengurus, sejumlah 100 % Koperasi menyatakan terdapat saran dan masukan anggota terhadap pengurus.

2. SDM, Akses Pasar, Penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), Akses Pembiayaan, Informasi dan Kelembagaan

A. Sumber Daya Manusia (Pengurus, Karyawan dan Anggota)

Sumber Daya Manusia yang mengelola Koperasi meliputi pengurus, karyawan dan anggota. Adapun kualitas SDM pengelola Koperasi digambarkan melalui tingkat pendidikan, pelatihan yang diterima, pekerjaan yang sesuai kompetensi serta apakah pengelola Koperasi merupakan pekerjaan sampingan.

Berdasarkan survei yang kami lakukan, tingkat pendidikan pengurus Koperasi yang terendah adalah jenjang SD sebesar 3%, selanjutnya SMP sebesar 33,4%. Sedangkan untuk karyawan dan anggota Koperasi memiliki tingkat pendidikan terendah yaitu SD sebesar 10% dan SMP sebesar 30%.

Terkait pekerjaan pengelolaan Koperasi apakah sesuai dengan kompetensi SDM atau tidak, sebanyak 93,2 % menyatakan telah memiliki kompetensi yang sesuai sebagai pengurus Koperasi, sedangkan sisanya sebanyak 3,4 % menyatakan tidak sesuai dan 3,4 % menyatakan tidak mengetahui. Suatu fenomena yang menarik dari hasil survei ini adalah saat menelaah pertanyaan mengenai apakah pengelola Koperasi memiliki pekerjaan lain diluar Koperasi, sebanyak 80 % pengurus dan karyawan Koperasi menyatakan memiliki pekerjaan lain

disamping pengurus dan karyawan Koperasi. Sedangkan sisanya sebanyak 20 % menyatakan tidak memiliki pekerjaan lain diluar Koperasi. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan untuk menelaah mengenai tingkat komitmen seseorang terhadap mata pencaharian sampingannya.

B. Akses Pasar

Akses pasar akan menilai mengenai apakah Koperasi telah dapat mengidentifikasi pasar utama dari produk Koperasi. Kemudian menilai apakah Koperasi dapat memperoleh akses untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk pemasaran produknya, serta apakah Koperasi memiliki peluang untuk memasuki gerai usaha retail.

Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, sebanyak 76,7% responden menyatakan telah mengetahui dan mengidentifikasi pasar utama dari produk Koperasi yaitu produk UMKM. Sedangkan sebanyak 23,3 % menyatakan tidak mengetahui. Lalu sebanyak 76,7% responden menyatakan bahwa Koperasi mereka mendapat akses untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk pemasaran, sedangkan sebanyak 6,7% menyatakan bahwa Koperasi mereka tidak memperoleh akses tersebut serta sebanyak 16,6% menyatakan tidak mengetahui. Demikian pula dengan kesempatan untuk memasuki gerai usaha retail, sebanyak 70 % responden menyatakan memiliki peluang, sedangkan sebanyak 6,7 % menyatakan tidak memiliki peluang dan sisanya menyatakan tidak mengetahui.

C. Penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Penilaian dalam penggunaan teknologi tepat guna terkait dengan apakah Koperasi tersebut telah terkomputerisasi dalam sistem pencatatannya, terhubung dengan internet dan dimanfaatkan dengan baik serta diawasi penggunaannya sehingga menjadi teknologi tepat guna dalam proses produksi.

Berdasarkan survei yang kami lakukan, sejumlah 93,3% responden menyatakan bahwa Koperasi mereka telah terkomputerisasi, sedangkan 6,7% sisanya menyatakan belum terkomputerisasi. Sedangkan untuk ketersediaan dan penggunaan internet secara baik, sejumlah 80% responden menyatakan komputer pada Koperasi mereka telah terhubung internet dan dimanfaatkan dengan baik.

Namun, 15% responden menyatakan komputer dalam Koperasi mereka tidak terhubung dengan internet. Selanjutnya terkait dengan pengawasan dalam penggunaan komputer dan internetnya, sejumlah 80% responden menyatakan bahwa pengawasan penggunaan komputer dan internet memang dilakukan, sedangkan 15% dari responden menyatakan tidak terdapat pengawasan dan 5% menyatakan tidak mengetahui. Terkait dengan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi, sejumlah 70% responden menyatakan telah menggunakan teknologi tepat guna, dan sejumlah 10% responden menyatakan tidak menggunakan teknologi tepat guna serta sejumlah 6,7% menyatakan tidak mengetahui.

D. Akses Pembiayaan

Akses pembiayaan dinilai berdasarkan kemudahan memperoleh pinjaman dari pihak perbankan, BUMN maupun bantuan dari pemerintah. Terkait dengan kemudahan mendapatkan pinjaman dari perbankan, sejumlah 66,7% responden menyatakan mudah mendapatkan pembiayaan dari perbankan, sementara 16,7 %

menyatakan tidak mudah dan sisanya menyatakan tidak mengetahui. Terkait dengan kemudahan memenuhi persyaratan kredit perbankan, sejumlah 66,7 % responden menyatakan mudah dalam memenuhi persyaratan kredit perbankan, sementara 13,4% menyatakan sulit dan sisanya menyatakan tidak mengetahui.

Selanjutnya terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman dari BUMN, sejumlah 66,7% responden menyatakan dapat memperoleh pinjaman dari BUMN, sedangkan 13,4 % menyatakan tidak memperoleh pinjaman dari BUMN serta sisanya menyatakan tidak mengetahui informasi terkait pinjaman dari BUMN. Terkait dengan apakah ada bantuan dari Pemerintah untuk Koperasi, sejumlah 73,4 % menyatakan mendapatkan bantuan dari Pemerintah, sementara 10 % menyatakan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah serta sisanya menyatakan tidak mengetahui.

E. Akses Informasi

Akses informasi terkait dengan informasi yang dimiliki dan dapat diakses oleh seluruh anggota Koperasi terkait: konsistensi diadakannya rapat tahunan Koperasi, konsistensi dalam penyusunan RAB untuk tahun selanjutnya serta RAB dianalisis dan dievaluasi setiap tahun, saran dan masukan dari anggota Koperasi, mekanisme penyebaran informasi pada anggota, peraturan Koperasi terkini, transparansi laporan keuangan Koperasi, kemudahan informasi dari dunia usaha tentang pemasaran produk Koperasi dan kemudahan informasi dari Pemerintah untuk pengembangan Koperasi.

Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, terkait konsistensi diadakannya rapat tahunan Koperasi, sejumlah 96,7% responden menyatakan selalu konsisten diadakan rapat tahunan, sedangkan sisanya sebesar 3,3 % menyatakan tidak konsisten. Terkait konsistensi dalam penyusunan RAB untuk tahun selanjutnya serta RAB dianalisis dan dievaluasi setiap tahun, sejumlah 93,4 % menyatakan bahwa RAB disusun setiap tahun dan dievaluasi dengan baik. Sedangkan sejumlah 6,6% menyatakan Koperasi tidak selalu menyusun RAB setiap tahunnya. Kemudian terkait apakah terdapat saran dan masukan dari anggota Koperasi, sebanyak 100% responden menyatakan terdapat saran dan masukan anggota bagi Koperasi terkait.

Selanjutnya terkait apakah terdapat mekanisme penyebaran informasi kepada anggota, sebanyak 90% responden menyatakan Koperasi telah memiliki mekanisme yang baik dalam menyebarkan informasinya, sedangkan sejumlah 10% menyatakan tidak memiliki mekanisme yang baik. Lalu terkait apakah Koperasi melakukan terkinian peraturan Koperasi, transparansi laporan keuangan Koperasi, sejumlah 96,7% menyatakan Koperasi mereka selalu memperbaharui informasi terkait peraturan mengenai Koperasi. Sedangkan sebanyak 3,3% menyatakan tidak mengetahui. Selanjutnya terkait apakah terdapat transparansi terhadap laporan keuangan Koperasi, sebanyak 90 % responden menyatakan terdapat transparansi, sedangkan 10 % menyatakan tidak mengetahui.

Terkait kemudahan informasi dari dunia usaha tentang pemasaran produk Koperasi, sejumlah 70 % responden menyatakan terdapat kemudahan informasi dari dunia usaha untuk memasarkan produk Koperasi, sedangkan sebanyak 10 % menyatakan tidak memperoleh informasi dari dunia usaha untuk memasarkan produk Koperasi dan sisa responden menyatakan tidak mengetahui. Kemudian terkait dengan kemudahan informasi dari pemerintah untuk pengembangan

Koperasi, sejumlah 73 % responden menyatakan memperoleh informasi dari pemerintah untuk pengembangan Koperasi, sedangkan sejumlah 10% menyatakan tidak memperoleh informasi dan sisanya menyatakan tidak mengetahui informasi dari Pemerintah untuk pengembangan Koperasi.

F. Akses Akuntabilitas & Kelembagaan

Akses akuntabilitas Koperasi terkait dengan pencatatan yang dimiliki oleh Koperasi apakah telah lengkap dan sesuai dengan PABU, serta apakah terdapat audit atas laporan keuangan. Terkait akses kelembagaan terkait dengan apakah terdapat struktur organisasi dan yang jelas di dalam Koperasi, apakah terdapat penyertaan pemerintah dalam kegiatan Koperasi serta apakah terdapat hubungan antara sesama Koperasi dan pemerintah.

Terkait dengan akses akuntabilitas, tentang kelengkapan pencatatan Koperasi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PABU, sejumlah 86,7% responden menyatakan Koperasi mereka memiliki pencatatan yang lengkap, dan 3,4% responden menyatakan tidak memiliki pencatatan yang lengkap. Lalu, sejumlah 86,7 % responden menyatakan bahwa laporan keuangan Koperasi telah disusun sesuai dengan PABU, sedangkan sebanyak 3,4 % menyatakan tidak sesuai dengan PABU dan 3,4 % menyatakan tidak mengetahui. Terkait dengan apakah Koperasi melakukan audit atas laporan keuangan, sejumlah 93,4% responden menyatakan Koperasi telah melakukan audit atas laporan keuangan, dan sejumlah 6,7 % responden menyatakan tidak mengetahui.

Terkait dengan akses kelembagaan, tentang apakah terdapat struktur organisasi dan pendelegasian tugas yang jelas dalam Koperasi, sejumlah 93,4% responden menyatakan Koperasi telah memiliki struktur organisasi dan pendelegasian tugas, sedangkan sebanyak 6,7% menyatakan tidak mengetahui. Terkait dengan apakah terdapat penyertaan pemerintah dalam kegiatan Koperasi, sejumlah 80% responden menyatakan terdapat penyertaan pemerintah dalam kegiatan Koperasi, sedangkan 10 % responden menyatakan tidak terdapat penyertaan pemerintah dan 10 % menyatakan tidak tahu. Terkait hubungan antara sesama Koperasi dan pemerintah, sejumlah 83,4% responden menyatakan terdapat hubungan antara sesama Koperasi dan pemerintah, sedangkan sebanyak 3,4% menyatakan tidak mengetahui.

3. Daya Saing Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kemampuan daya saing produk Koperasi dinilai dengan kemampuan memenuhi spesialisasi produk, kualitas produk Koperasi dibandingkan produk impor, harga jual produk Koperasi dibandingkan dengan harga jual produk impor, HPP produk Koperasi dihitung sesuai dengan PABU serta penyebab harga produk Koperasi lebih tinggi dari produk impor.

Berdasarkan survei yang kami lakukan terkait kemampuan memenuhi spesialisasi produk, sebanyak 76,7 % responden menyatakan kesulitan dalam memenuhi spesialisasi produk, sedangkan sebanyak 3,4% menyatakan tidak kesulitan dalam memenuhi spesialisasi produk serta sisanya menyatakan tidak mengetahui. Terkait bagaimana kualitas produk Koperasi dibandingkan dengan produk impor sebanyak 73,4% responden menyatakan kualitas produk Koperasi lebih rendah dari kualitas produk impor, sedangkan 6,7 % menyatakan tidak mengetahui. Terkait dengan harga jual produk Koperasi dibandingkan dengan harga jual produk impor,

sebanyak 66,7 % responden menyatakan harga produk Koperasi lebih tinggi dari harga produk impor, sedangkan 3,4 % responden menyatakan harga produk Koperasi lebih rendah dari harga produk impor, serta 3,4 % menyatakan tidak mengetahui.

Selanjutnya terkait apakah HPP produk Koperasi telah dihitung sesuai dengan PABU, sejumlah 70% menyatakan HPP telah dihitung sesuai dengan PABU, sedangkan sebanyak 3,4% menyatakan tidak tahu. Selanjutnya penyebab harga produk Koperasi lebih tinggi dari produk impor berdasarkan survei, terdapat responden yang menyatakan harga dari produsen atau suppliernya sudah mahal sehingga ketika Koperasi menjual hasil produksinya, harga jual menjadi tinggi.

4. Inovasi dan Pengembangan Produk

Terkait dengan inovasi dan pengembangan produk, beberapa responden memberikan masukan agar produk Koperasi dapat bersaing dengan produk impor, antara lain: Koperasi harus bekerjasama dengan produsen agar harganya dapat bersaing dan dipermudah dalam penyaluran produknya, pemerintah harus memperkuat posisi Koperasi dalam perekonomian nasional, sehingga lebih sederhana prosesnya dalam memperoleh pinjaman.

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menggambarkan mengenai permasalahan yang dihadapi Koperasi di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat serta menjawab identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Analisis masalah yang dihadapi oleh Koperasi di Kabupaten Subang sebagaimana dirumuskan dalam RJPMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yang meliputi:

A. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan usaha Koperasi.

Tingkat partisipasi anggota digambarkan melalui kehadiran rapat, penggunaan jasa Koperasi, rata-rata pertumbuhan Koperasi, minat menjadi pengurus serta adanya saran dan masukan anggota. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi anggota Koperasi cukup tinggi, sebab lebih dari setengah responden menjawab bahwa rapat tahunan selalu dihadiri anggotanya dengan memenuhi ketentuan *quorum*. Kemudian, mengenai penggunaan jasa Koperasi oleh para anggotanya, hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden menyatakan jika minimal 50 % anggota menggunakan jasa Koperasi.

Dari sudut regenerasi, peminatan anggota untuk meneruskan menjadi pengurus Koperasi cenderung tinggi, karena terdapat 73,4% responden menyatakan anggotanya memiliki antusiasme menjadi pengurus. Mengenai saran dan masukan dari anggota terhadap pengurus, sejumlah 100% Koperasi menyatakan terdapat saran dan masukan anggota terhadap pengurus. Dengan demikian, tingkat partisipasi anggota Koperasi di wilayah Kabupaten Subang **tidak dapat dikatakan rendah**, kecuali untuk tingkat pertumbuhan Koperasinya.

B. Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan teknologi tepat guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan.

Terkait dengan tingkat SDM Koperasi Kabupaten Subang dinilai cukup memadai dari sisi kompetensi. Namun jika dilihat dari tingkat pendidikannya, masih banyak SDM yang belum mengenyam pendidikan yang memadai.

Terkait dengan akses pasar, sebagian besar responden yaitu 76,7% menyatakan dapat memperoleh mengenai kerjasama dengan pihak luar untuk pemasaran serta bagaimana untuk memasuki pasar retail.

Di bidang teknologi, sebagian besar responden (93,4%) menyatakan telah menggunakan komputerisasi dalam sistem Koperasi mereka dimana 80 % dari pengguna komputer juga menggunakan internet dan penggunaannya dilengkapi dengan sistem pengawasan dari organisasi mereka. Penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksinya terlihat cukup tinggi yakni 70% dari SDM mereka.

Terkait dengan akses pembiayaan, sebesar 66,7% responden yang menyatakan dapat memperoleh pembiayaan dari Bank, 66,7 % mendapat pinjaman dari BUMN dan hanya 73,4% yang menyatakan mendapat bantuan dari pemerintah.

Terkait dengan akses informasi, untuk akses informasi di dalam internal Koperasi sudah sangat baik, sebab 96,7% responden menyatakan rutin diadakan rapat tahunan dan penyusunan anggaran tahunan, serta Koperasi selalu memperbaharui informasi informasi terkait Koperasi dan menyebarkannya kepada seluruh anggota. Untuk akses informasi yang berhubungan dengan dunia usaha dan pemerintah cenderung tinggi, yaitu 70% Koperasi menyatakan memperoleh informasi terkait kerjasama dengan dunia usaha & 73,4% menyatakan memperoleh informasi tentang bantuan pemerintah untuk mengembangkan Koperasi.

Terkait dengan akses akuntabilitas, tentang kelengkapan pencatatan Koperasi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PABU, sejumlah 86,7% responden menyatakan Koperasi mereka memiliki pencatatan yang lengkap, sedangkan 86,7% responden menyatakan bahwa laporan keuangan Koperasi telah disusun sesuai dengan PABU, dan 93,4% responden menyatakan Koperasi telah melakukan audit atas laporan keuangan. Terkait dengan akses kelembagaan, sejumlah 93,4% responden menyatakan Koperasi telah memiliki struktur organisasi dan pendelegasian tugas, sedangkan 80% responden menyatakan terdapat penyertaan pemerintah dalam kegiatan Koperasi.

Melihat kondisi diatas, maka permasalahan kedua bagi Koperasi Kabupaten Subang yaitu masih banyaknya SDM yang berpendidikan menengah ke bawah.

C. Daya saing produk Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor

Terkait kemampuan memenuhi spesialisasi produk, sebanyak 76,7% menyatakan kesulitan dalam memenuhi spesialisasi produk, selanjutnya sebanyak 73,4 % responden menyatakan kualitas produk Koperasi lebih rendah dari kualitas produk impor, sedangkan 66,7% responden menyatakan harga produk Koperasi lebih tinggi harganya dari produk impor. Beberapa alasan harga produk Koperasi lebih tinggi dari produk impor berdasarkan survei, yaitu terdapat responden yang menyatakan harga dari produsen atau suppliernya sudah mahal, sehingga ketika Koperasi menjual hasil produksinya harga menjadi tinggi, serta sejumlah 70% responden menyatakan HPP produk Koperasi telah dihitung sesuai dengan PABU.

Melihat kondisi diatas, terdapat permasalahan terkait daya saing dari sisi kualitas produk Koperasi di wilayah Kabupaten Subang yang lebih rendah dibandingkan produk impor disertai dengan harga jual produk Koperasi lebih tinggi daripada produk impornya.

D. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk

Terkait dengan inovasi dan pengembangan produk, pengurus Koperasi berharap dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha (produsen) dan pemerintah, agar Koperasi dapat memperoleh bantuan pinjaman dari pihak luar (Bank, BUMN dan Pemerintah). Hasil survei menunjukkan bahwa rendahnya inovasi dan pengembangan produk masih menjadi masalah di Koperasi Kabupaten Subang.

2. Apakah terdapat masalah lain yang secara spesifik menjadi masalah utama yang saat ini dihadapi oleh Koperasi di Kabupaten Subang?

Berdasarkan hasil survei peneliti, permasalahan lain yang mungkin muncul di Koperasi Kabupaten Subang adalah mulai berkurangnya jumlah Koperasi yang aktif. Sebab berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Koperasi Kabupaten Subang sebanyak 50% Koperasi tidak aktif, 25% Koperasi tidak terkelola secara regular dan sisanya hanya 25% Koperasi yang aktif sampai dengan data penelitian ini disusun.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Kabupaten Subang Jawa Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan teknologi tepat guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan, khususnya dari sisi latar belakang pendidikan mereka yang belum memadai.
 - b. Rendahnya kualitas daya saing produk hasil koperasi di wilayah Kabupaten Subang dibandingkan produk impor. Kualitas produk mereka masih di bawah produk impor namun harga produknya lebih tinggi daripada produk impor.
 - c. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.
2. Permasalahan lain yang dihadapi Koperasi Kabupaten Subang Jawa Barat adalah mulai berkurangnya jumlah koperasi yang aktif. Sebab berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Koperasi Kabupaten Subang sebanyak 50% koperasi tidak aktif, 25% koperasi tidak terkelola secara regular dan sisanya hanya 25% koperasi yang aktif sampai dengan data penelitian ini disusun. Terkait situasi ini, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, kami berasumsi bahwa situasi ini terjadi dilatarbelakangi bahwa pengelola koperasi memiliki pekerjaan lain diluar koperasi, yaitu sebanyak 80 % pengurus dan karyawan koperasi menyatakan memiliki pekerjaan lain disamping pengurus dan karyawan koperasi. Sedangkan sisanya sebanyak 20 % menyatakan tidak memiliki pekerjaan lain diluar koperasi. Hal ini dikhawatirkan dari sisi komitmen dan fokus SDM Koperasi terhadap organisasinya.

Saran

Untuk Koperasi

1. Mengingat 60% Koperasi belum memberikan pelatihan terhadap pengurus Koperasi selaku SDM mereka, maka disarankan mereka mulai memberikan pelatihan secara berkesinambungan demi meningkatkan kualitas SDM baik dari sisi teknis maupun dari sisi pemahamannya terhadap Koperasi.
2. Pemerintah dapat terus menaikkan standar minimal wajib sekolah kepada masyarakat sehingga mereka yang terlibat sebagai generasi penggerak ekonomi dapat memiliki kualitas dan pengetahuan yang memadai, termasuk mereka yang terlibat dalam usaha Koperasi. Pendidikan Menengah dan Dasar bukan lagi menjadi syarat yang cukup baik bagi mereka yang ingin berwirausaha ataupun berkarya di dunia usaha sebagai salah satu SDM-nya.
3. Mengenai daya saing produk Koperasi yang masih lemah jika dibandingkan dengan produk impor, sebaiknya diadakan kerjasama antar koperasi untuk menghimpun dana yang lebih besar demi memperoleh harga pokok yang lebih bersaing. Disisi lain, proses *benchmarking* dapat saja menjadi usulan bagi mereka sehingga mereka dapat mempelajari praktik pengelolaan dan produksi yang lebih baik dan lebih efisien dari pelbagai industri pesaing khususnya industri di luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah dapat membantu memberikan dukungan dana untuk proses pembelajarannya (sejenis beasiswa singkat).

Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebelum membahas saran penelitian, peneliti memiliki keterbatasan yaitu hanya mendapatkan 30 kuesioner yang terisi memadai untuk memperoleh gambaran permasalahan koperasi di wilayah Kabupaten Subang. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, agar dapat menambah jumlah responden yang lebih besar, serta mencoba untuk melakukan survei cabang koperasi aktif yang lebih luas di wilayah Kabupaten Subang, agar hasil penelitian selanjutnya dapat memperoleh gambaran permasalahan koperasi yang lebih reliabel dan jelas di wilayah Kabupaten Subang.

Daftar Pustaka

- Ahsan, Abdillah & Nurmayanti, Emy. 2016. *Cooperatives in Indonesia: Recent Conditions and Challenges*, <http://www.researchgate.net/publication/307599134>. Pdf.
- Arisanti, R. 2014. Pengaruh Modal terhadap Tingkat Rentabilitas pada Koperasi KPRI Palembang Periode 2010-2012, <http://eprints.polsri.ac.id>.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Jawa Barat dalam Angka 2012, Indonesia.
- Bappeda Jawa Barat. 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, <http://www.jabarprov.go.id>.
- Firmansyah, Muhamad. 2014. Peran Koperasi Mahasiswa dalam Menegakkan Kembali Koperasi Indonesia sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia Menghadapi *Asean Economic Community* 2015, Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Hadikusuma, Sutantya R. 2001. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harini. 2013. Pemberdayaan Koperasi Berbasis Anggota: Studi Kasus pada Kopari Bina Wisata Grojogan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar,

- <http://kampus.okezone.com/read/2013/12/11/373/910765/disertasi-Koperasi-usung-harini-raih-gelar-doktor>. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hatta, Mohammad. 1947. *Penunjuk Bagi Rakjat Dalam Hal Ekonomi: Teori dan Praktek*. Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakjat, Jakarta.
- Hill, Gerald N. dan Hill, Kathleen T. 1981-2005. *Cooperative*, <http://www.legal-dictionary.thefreedictionary.com>.
- Irdhania, A., Sandi, R. N., Nursechafia, Gustara, H. 2008. *Minimnya Partisipasi Anggota sebagai Penyebab Stagnasi Koperasi di Indonesia (Studi Kasus: Koperasi Serba Usaha Bhakti Mandiri)*, Bogor, Universitas Pertanian Bogor.
- Jauhari, Hasan. 2006. *Mewujudkan 70.000 Koperasi Berkualitas*. INFOKOP No. 28-XXII: 1-9.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2013. *Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi per 31 Desember 2013*, <http://depkop.go.id>.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2014. *Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi per 31 Desember 2014*, <http://depkop.go.id>.
- Maelani, Ineu. 2011. *Peran Koperasi Dalam Ekonomi Kerakyatan*. Penelitian Ilmiah. Jakarta, Universitas Gunadarma.
- Masngudi. 1990. *Penelitian tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia*, Jakarta, Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2007. *Mengembangkan Konsep Bisnis Koperasi: Digali Dari Realitas Masyarakat Indonesia*. Makalah dipresentasikan pada Diskusi Panel Kajian Koperasi: Peluang dan Prospek Masa Depan, Malang: Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang.
- Prahalad, C.K. & Gary Hamel. May-June 1990. *The Core Competence of the Corporation*, *Harvard Business Review*: 1-12.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Indonesia.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerKoperasian*, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian*, Jakarta.
- Sitompul, Anwar. 2010. *Strategi dan Langkah-Langkah UMKM dan Koperasi dalam Menghadapi ACFTA*, INFOKOP Vol. 18: 40-51.
- Soetrisno, Noer. Agustus 2002. *Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan*, *Jurnal Ekonomi Rakyat Thn II No. 5*.
- Sudarsono dan Edilius. 2005. *Koperasi: Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudoyo, Wahyu. 2014. *Kontribusi Koperasi terhadap PDB Belum Signifikan*, <http://www.beritasatu.com>.
- Suwatno. 2010. *Strategi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*. Penelitian, Bandung: LPPM UPI.
- Team Universitas Gajah Mada. 1984. *Koperasi Sebuah Pengantar*, Jakarta, Departemen Koperasi.